

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latif, 2007, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta.
- Abdul Latif, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta.
- Achmad Roestandi, 2005, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Setjen Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normative*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan: Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta.
- Fathurohman, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- , 2009, *Transformasi dan Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan kepanitaraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I MadePasek Dianthe, 2017. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Imam Soebechi, 2016, *Hak Uji Materiil*, Cet. 1, Sinar Gratifika, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Janedrji M. Gaffar, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekeretaris Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Cet. 2, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- _____, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2006, *Judicial review Dalam Hukum Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2006, *Setengah Abad Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Semangat Kebangsaan*, PT. Sumber Agung, Jakarta.
- _____, 2009, *Menuju Negara Hukum Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- _____, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Juhaya S Praja, 2011, *Teori dan Hukum Konstitusi.*: Nusa Media. Bandung.
- Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 2000, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Lexy J Moleong, 2008, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mukhlis Taib, 2017, *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*, Cetakan 1, PT Refika Aditama, Bandung.
- _____ dan Amrizal J. Prang, 2017, *Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Kedua, Unimal Press, Kota Lhokseumawe.
- M Sabana, 2005, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung.

- Mahfud MD, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Rajawali Press, Jakarta.
- Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Masri Sofyan Effendi Singaribun, 1997, *Metode Penelitian Survey*”, LP3ES, Jakarta.
- Miriam Budiharjo, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mukti Fajar ND, dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ni’matul Huda, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Pan Mohammad Faiz, 2016, *Relevansi Doktrin Negative legislator*, Majalah Konstitusi No. 108. Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- _____ dan M. Lutfi Chakim, 2020, *Peradilan Konstitusi Perbandingan Kelembagaan Dan Kewenangan Konstitusional Di Asia*, , Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Peter Mahmud, Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- _____, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum.*: Kencana. Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 1993, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Imus, Surabaya.
- S.F. Marbun, 2013, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. FH UII Press, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Sukanto, dan Sri Mammudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Soemantri, 1986, *Hak Menguji Materiil Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sutrisno Hadi, 1994, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Yuliandri, 2021, *Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Demokratis di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 juncnto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XXII/2024,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/SKLN-IV/2006,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengujian Undang-Undang

C. Jurnal/Artikel Ilmiah

Abdul Basid Fuadi, 2020, "Pertanggung Jawaban Pribadi Dan Jabatan Dalam Hukum Administrasi Negara", *Supremasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, hlm 52. <https://doi.org/10.14421/sh.v9i2.2158>

- Anajeng Esri Edhi Mahanani, 2020, *Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positif Legislature Ditinjau Dari Progresivitas Hukum Dan Teori Pemisahan Kekuasaan*, Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Volume 54, Nomor 2, hlm. 920. <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.920>
- Adena Fitri Puspita Sari, dan Purwono Sungkono Raharjo, 2022, “Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative legislator* Dan Posistive Legislator”, *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1, hlm 683. <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.112>
- Adrianus Bawamenewi, 2020, “Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara”, *Jurnal Warta Edisi* 63, Vol. 14, No. 1, hlm. 113. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i1.545>
- Agus Satria Adi Husada, dan Hananto Widodo, 2018, “Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 46/Puu-Xiv/2016 Sebagai Negstive Legislator” *Jurnal Novum*, Vol. 3, No 1, , hlm. 126.
- Ahmad Ari Fatullah, dkk, 2025, “Implikasi Konstutisional Dan Sistematis : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada”, *ELQANUN : Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 3, No. 1. <https://doi.org/10.19109/1qg9pc62>
- Aidil Firmansyah, dkk, 2024, “Putusan Pegadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi”, *WATHAN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, No 2, hlm. 145. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>
- Amrizal J. Prang, “Implikasi Hukum Mahkamah Konstitusi”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 53, April 2011 <https://doi.org/10.24815/KANUN.V13i1.6233>
- Bambang Sutiyoso, 2010, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1. hlm. 95.
- Bustanul Arifin, 2010, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia”, *Al Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, hlm. 130. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.125-148>
- Christine S.T Kansil, dan Namira Diffany Nuzan, 2024, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024”, *Unnes Law Review*, Vol. 6, No. 4, hlm. 10745. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

- Dimas Adiansyah, dan Ninuk Wijingsih, 2024, “Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Verfassungsgerichtshof Austria”, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 6, No. 4, hlm. 1616. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i4.21612>
- Dina Pri Wanti, 2025, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Studi Komparatif Dengan Mahkamah Konstitusi Turki*, Jurnal Fakta Hukum, Volume 3, Nomor 2, , hlm. 67. <https://doi.org/10.58819/jfh.v3i2.154>
- Eka Nam Sihombing, dan Cynthia Hadita, 2022, “Perbandingan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Antara Indonesia Dan Beberapa Negara Di Dunia (Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)”, *Mahadi : Indonesia Journal Of Law*, Vol. 1, No. 1, hlm. 22. doi:10.32734/mah.v1i1.8312
- Eko Supriyanto, 2016, “*Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undan-Undang*”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 3, hlm. 385. <https://doi.org/10.20473/Ydk.V31i3.4822>
- Fira Natasha, dan Ridham Priskap, 2021, “Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”, *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 3, hlm 519 <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.15911>
- Ghoniya Zulindah Maulidya, dkk, 2023, “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia”, *HUKMY : Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 12. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>
- Gugun Gunawan, dkk, 2025, “Implikasi Konstitusional Putusan Mk Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah”, *JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 6, No. 1. <https://doi.org/10.38035/Jihhp.V6i1.6351>
- Ika Kurniawati, dan Lusy Liany, 2019, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative legislator* Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, *Adil : Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, hlm. 117. <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>
- Indra Wicaksono, 2019, “Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Hukum Nasional Dengan Model Preventive Review”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 49, No. 1, hlm. 91. <https://doi.org/10.33331/Mhn.V49i1.94>

- Ilham Dwi Rafiqi, *Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dan Rusia*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, hlm. 12. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.3561>
- Joseph Atja Sulandra, dan Anak Agung Ngurah Roy Sumahardika, 2016, “Lembaga *Judicial review* Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar: Perbandingan Antara Kewenangan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5, No. 2, Juli 2016, hlm. 89. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/22437>
- Khotob Tobi Alamalibari, dkk, 2019, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum, *Jurnal Rechten, Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 2, hlm. 36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.21>
- Kosariza, Netty, Meri Yarni, 2020, Analisis Penyelesaian Sngketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi, *Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2, hlm. 548. <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/11001>
- Lefi Mikhael, 2020, *Studi Perbandingan Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Crepido, Volume 4, Nomor 2, hlm. 151. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2>.
- M Asro, 2017, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol. 11, No. 2, 2017, Hlm. 153. <https://doi.org/10.15575/Adliya.V11i2.4857>
- M. Noor Harisuddin, dan Fika Alfiella, 2022, “Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang 1945”, *Constitutional Journal*, Vol. 1, No. 1, <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i1.4>
- Meidiana, 2019, “Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 395. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.381-408>
- Moh. Mahfud MD, 2009, “Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 4, hlm. 5. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art1>
- Moh. Sofyan Ismail, 2016, “Analisis Fiqh Siyâsah Terhadap Partai Politik Lokal Di Nanggroe Aceh Darussalam.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, vol. 6, No. 2, hlm. 342. <https://doi.org/10.15642/Ad.2016.6.2.340-368>

- Muflih Munazih dan Dina Faramida, 2025, "Constitutional Judicial System: A Comparison Between Indonesia And France", *Trunojaya Law Review*, Vol. 7, No. 2, hlm. 391. <https://doi.org/10.21107/tlr.v7i2.30462>
- Muhammad Mahrus Ali, 2015, "Konstitusional Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1, hlm. 176. <https://doi.org/10.31078/jk12110>
- Muhklis, "Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Dalam Memutus Dan Menafsirkan Uud Setelah Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945", *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2011. <https://doi.org/10.29313/sh.v13i1.649>
- Nanang Sri Darmani, 2015, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, No. 2, hlm. 261. <https://media.neliti.com/media/publications/12287-ID-kedudukan-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-hukum-ketatanegaraan-ind.pdf>
- Netty Kosariza, dan Meri Yarni, 2020, "Analisis Penyelesaian Sngketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi", *Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2, hlm. 548. <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/11001>
- Nurhayati, 2015, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Dalam Pengujian Undang- Undang", *JOM UNRI Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 13. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7048>
- Putu Eva Ditayani Antari, 2014, "Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Persfektif Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, hlm 389. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.V03.I03.P03>
- Ryan Fachryan Lesmana Putra dan Nandang Pamungkas, 2025, *Kedudukan Konstitusional Complaint Dalam Mahkamah Konstitusional*, *Jurnal Of Dual Legal Systems*, Volume 2, Nomor 1, , hlm 30. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.319>
- Sekar Arum Kusama Jati, dkk, 2024, "Analisis Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Hak Uji Materiil (*Judicial review*) Pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023", *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 2, No. 4, hlm 2. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1583>
- Syara Nurhayati, dkk, 2015, Mahkamah Kontitusi Sebagai Positive Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang 1945, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum UNRI*, Volume 2 Nomor 2, Hlm. 67.

- Suparto, 2019, “Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. Xix, No. 1, <http://dx.doi.org/1024014/hi.v19i1.7044>
- Tanto Lailam, 2023, “Perbandingan Desain Pengujian Konstitusional Pada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman Dan Indonesia”, *Arena Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2023, hlm. 274. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.4>
- Wendra Yunaldi, 2018, “Jucial Review “Satu Atap” Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1, No. 2, hlm 206. <https://doi.org/10.31869/Plj.V1i2.565>
- Winda Indah Wardani, dan Laga Sugiarto, 2023, “Perbandingan Desain Isu Kewenangan *Judicial review* Di Mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Thailand”, *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 2, No. 1, hlm. 188, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.55>

D. Tesis/Skripsi

- Ardiansyah Yuditomo, 2016, Analisis Yuridis Putusan Ptun Yogyakarta Tentang Sengketa Kepegawaian (Studi Komparasi Perkara No:10/G/2010/PTUN-YK Dalam Perkara Mutasi Guru Dengan Perkara No:06/G/2013/PTUN-YK Dalam Perkara Ralat SK Menteri Kehutanan), *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Aulia, 2021, Analisis Kebijakan Penghentian Penyidikan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, *Thesis*, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.
- Bintang Fajar Anom 2025, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengubah Norma Hukum Menjadi Undnag-Undang Melalui *Judicial review*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan.
- Bogi Sihantori, 2023, Analisis Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah, *Tesis*, Magister Hukum, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu.
- Darmawan, Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden, *Tesis*, UIN Sunan Ampes Surabaya, 2022, hlm. 4.

Fika Alfiella, 2021, Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, *Skripsi*, Institute Agama Islam Negeri Jember, Fakultas Syariah, Jawa Timur.

Ridho Oganda Putra, 2025, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Positive Legislator Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2024)*, Skripsi, Fakultas Tarbiyah Uin Maulana Malik Ibrahim, Malang.

E. Internet

Ady Thea DA, Pilkada Masuk Rezim Pemilu, Mk Dituding Melampaui Kewenangannya, 7 Juli 2025 (Diakses Pada 6 Februari 2026 Pukul 15.48 WIB) <https://www.hukumonline.com/berita/a/pilkada-masuk-rezim-pemilu-mk-dituding-melampaui-kewenangannya-lt686b2c852a285/>

Aida Mardatillah, Amandemen Konstitusi Lewat Putusan MK Dan Konvensi, 22 Agustus 2019 (Diakses Pada 6 Februari 2026) <https://www.hukumonline.com/berita/a/amandemen-konstitusi-lewat-putusan-mk-dan-konvensi-lt5d5d83d66e2fd/>

Aji Prasetyo, MK Putuskan UU Tapera Bertentangan Dengan UUD 1945, 20 September 2025, (Diakses Pada 6 Februari 2026 Pukul 11.55 WIB) <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putuskan-uu-tapera-bertentangan-dengan-uud-1945-lt68da575af026d/>

Amrizal J Prang, Putusan MK Dan Implikasi UUPA, 29 Juli 2025, (Diakses Pada 6 Februari 2026 Pukul 3.29 Wib) https://aceh.tribunnews.com/2025/07/29/putusan-mk-dan-implikasi-uupa#google_vignette

Arga Sumantri, Putusan MK Soal Pemilu Dinilai Inkonsisten, Pakar Beberkan Alasannya, 6 Juli 2025 (Diakses Pada 6 Februari 2026 Pada Pukul 10.20 WIB) <https://www.metrotvnews.com/read/kWDCnre5-putusan-mk-soal-pemilu-dinilai-inkonsisten-pakar-beberkan-alasannya>

Brian Padden, *Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Sahkan Pemakzulan Presiden*, 10 Maret 2017, (Diakses Pada Rabu 4 February 2026 Pukul 14.01 WIB) <https://www.voaindonesia.com/a/mahkamah-korea-selatan-pemakzulan-presiden/3758357.html>

Danang Al Hidayat, (2025, 8 April) *Apakah Hasil Pemungutan Suara Ulang Dapat Digugat Kembali?*, (Diakses Pada 5 Oktober 2025, Pukul 10.20 WIB) <https://iaksetihsetio.ac.id/apakah-hasil-pemungutan-suara-ulang-dapat-digugat-kembali/>

- Dwi Rindra T, (2025, 25 Juni) *Etika Dalam Penyelenggaraan Pemilu*, (Diakses Pada 5 Oktober 2025) <https://kab-banyumas.kpu.go.id/blog/read/etika-dalam-penyelenggaraan-pemilu>
- Fath Putra Mulya, Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Masih Dalam Tugas Konstitusional, Antara 1 Juli 2025 (Diakses Pada 4 Januari Pukul 10.57 WIB) <https://www.antaranews.com/berita/4935593/putusan-mk-soal-pemisahan-pemilu-masih-dalam-tugas-konstitusional>
- Hakim Konstitusi | Mahkamah Konstitusi RI (Diakses Pada 10 September 2025 Pukul 15. 24 Wib) <https://www.mkri.id/Hakim>
- Handi, MK Batalkan UU Tapera, Permohonan KSBSI Dikabulkan Seluruhnya, 29 September 2025, (Diakses Pada 6 Februari 2026 Pukul 12.21 WIB) <https://www.ksbsi.org/home/read/2670/MK-Batalkan-UU-Tapera--Permohonan-KSBSI-Dikabulkan-Seluruhnya->
- Mario Christian Sumampow, Menko Yusril: Pemilu 2029 Ikut Arahkan Mahkamah Konstitusi, Tidak Ada Istilah Pilkada, Rabu 7 Januari 2026, (Diakses Pada 6 Februari 2026 Pukul 10.12 WIB) <https://m.tribunnews.com/nasional/7775917/menko-yusril-pemilu-2029-ikut-arahan-mahkamah-konstitusi-tidak-ada-istilah-pilkada>
- Norman Edwin Elnizar, (2019, 23 Mai), *Pembuktian Krusial Dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres*, (Diakses Pada 5 Oktober 2025, Pukul 09.45 WIB) <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembuktian--masalah-krusial-dalam-penyelesaian-sengketa-pilpres-lt5ce5580db3cc2/>
- Singgih Wiryono dan Robertus Belarminus, Yusril Ungkap Potensi Pelanggaran Konstitusi Jika Putusan Mk Pemisahan Pemilu Nasional Ditetapkan, Kompas.COM, 2 Juli 2025 (Diakses Pada 4 Januari 2025 Pukul 10.47 WIB) <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/02/14331191/yusril-ungkap-potensi-pelanggaran-konstitusi-jika-putusan-mk-pemisahan>
- SIP Law Firm, *Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Mahkamah Konstitusi*, (diakses Pada 10 September 2025 Pukul 15. 24 WIB) [https://siplawfirm.id/tugas-fungsi-dan-tanggung-jawab-mahkamah-konstitusi/#:~:text=Tugas%20MK%20&%20Fungsinya,Presiden%20diduga%20melakukan%20pelanggaran%20\(impeachment\)](https://siplawfirm.id/tugas-fungsi-dan-tanggung-jawab-mahkamah-konstitusi/#:~:text=Tugas%20MK%20&%20Fungsinya,Presiden%20diduga%20melakukan%20pelanggaran%20(impeachment))
- Sovia Hasanah, (2018, 29 Juni), *Pengadilan Yang Berwenang Mengadili Perkara Tindak Pidana Pemilu*, (Diakses Pada 5 Oktober 2025, Pukul 09.50 WIB) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengadilan-yang-berwenang-mengadili-perkara-tindak-pidana-pemilu-lt5b0b6fbf5f0c8/>
- Sovia Hasanah, *Pengadilan Yang Berwenang Mengadili Perkara Tindak Pidana Pemilu*, 29 Juni 2018, (Diakses Pada 5 Oktober 2025, Pukul 09.50 WIB)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengadilan-yang-berwenang-mengadili-perkara-tindak-pidana-pemilu-lt5b0b6fbf5f0c8/>

Willa Wahyuni, (2024, 12 Januari), *Ini Syarat dan Ketentuan Melaporkan Pelanggaran Pemilu Ke Bawaslu*, (Diakses Pada 5 Oktober 2025, Pukul 10.12 WIB). <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-syarat-dan-ketentuan-melaporkan-pelanggaran-pemilu-ke-bawaslu-lt65a1211e5ad6b/>